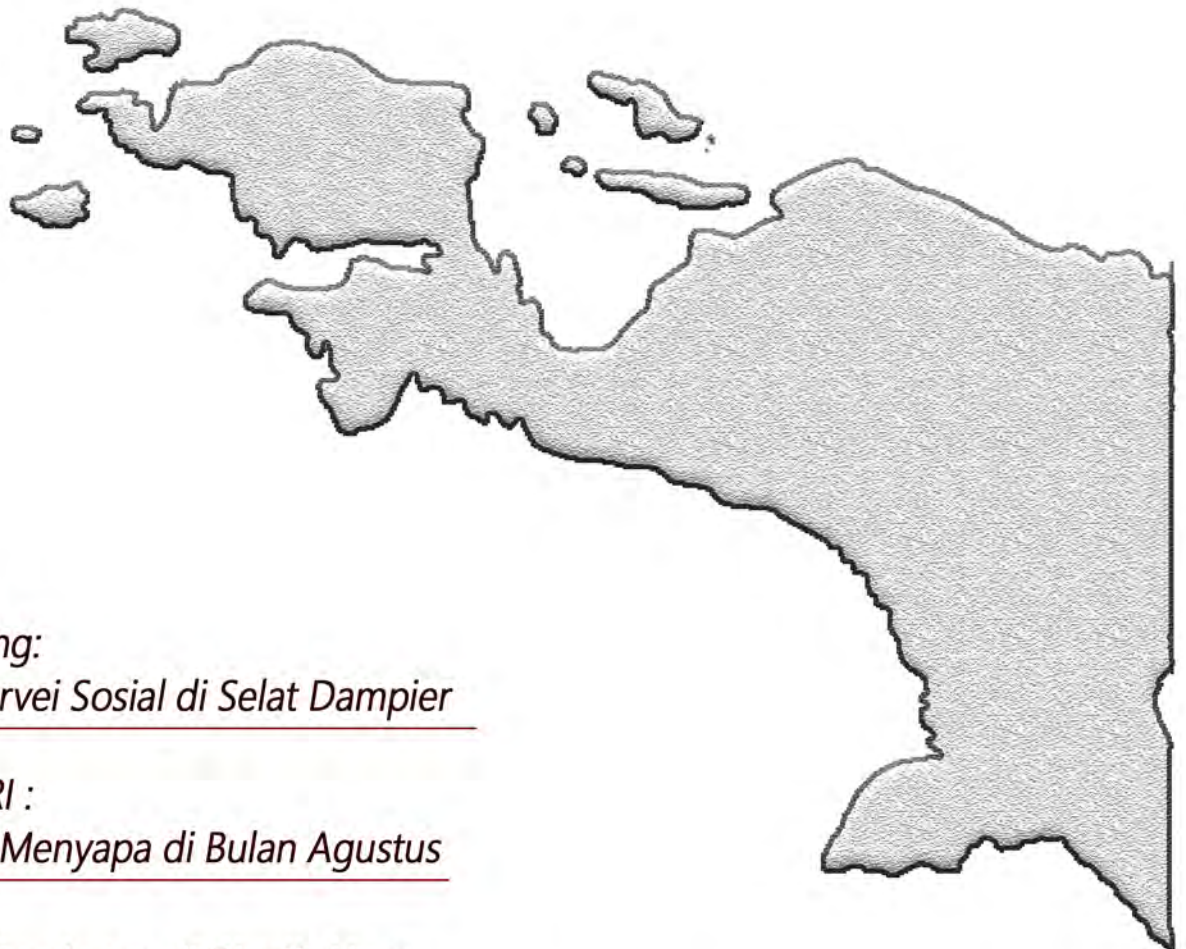




Cerita Lapang:
Kegiatan Survei Sosial di Selat Dampier

Program RRI :
Manokwari Menyapa di Bulan Agustus

Pelayanan Kesehatan di Distrik Abun
kerjasama UNIPA dan Dinas Kesehatan Kab. Tamberauw

Cerita Lapang:
Kunjungan ke Pantai Peneluran Penyu Belimbing
dan Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Tamberauw

Dari Redaksi

Sejak Juli 2015 hingga kini, Divisi Pembangunan Berkelanjutan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Papua rutin menerbitkan kumpulan cerita dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama waktu 3 bulan. Kumpulan cerita ini kemudian kami bagikan dalam bentuk Newsletter. Pada September 2017 ini, Newsletter edisi IX (Juni hingga Agustus) terbit dengan memuat 12 cerita kegiatan.

Cerita dari beberapa kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulannya, seperti cerita dari kerjasama dengan RRI dalam Program Manokwari Menyapa yang menghadirkan pembicara dari lingkup UNIPA menjadi bagian cerita di edisi ini. Selain itu, terdapat beberapa cerita dari lapang juga mewarnai cerita di edisi ini.

Pada edisi ini, nama newsletter yang sebelumnya Center of Excellence UNIPA News diubah menjadi Divisi Pembangunan Berkelanjutan UNIPA News. Dengan perubahan nama ini diharapkan para pembaca menjadi lebih mengenal Divisi Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIPA.

Edisi ini juga memuat kolom "Sekilas Mengenai Divisi Pembangunan Berkelanjutan-LPPM", kami memandang perlu untuk selalu memuat artikel ini sebagai bagian untuk "memperkenalkan" Divisi Pembangunan Berkelanjutan kepada para pembaca yang baru pertama kali membaca newsletter ini. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah menyumbang tulisan dalam edisi ini.

Program-program yang kami lakukan melalui Divisi Pembangunan Berkelanjutan kami dedikasikan untuk menghasilkan program-program yang memungkinkan LP2M UNIPA menjadi sumber data dan informasi untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Setiap anggota divisi ini memiliki dedikasi yang kuat untuk mewujudkan visi tersebut dengan menghasilkan cerita-cerita terbaik yang dapat kami sumbangkan dalam setiap edisi newsletter yang dikeluarkan.

Untuk memperoleh informasi lengkap mengenai kegiatan yang telah dilakukan maupun baru akan dilakukan dapat menghubungi alamat lengkap kami yang terletak di bagian akhir Newsletter ini. Selamat Membaca!

Fitryanti Pakiding
Ketua Divisi Pembangunan Berkelanjutan
LPPM UNIPA

Artikel yang ditulis oleh para penulis, sepenuhnya merupakan opini yang bersangkutan dan redaksi tidak bertanggungjawab terhadap isinya.

Daftar Isi

<i>Dari Redaksi dan Daftar Isi</i>	i
<i>Sekilas Tentang Divisi Pembangunan Berkelanjutan LPPM UNIPA</i>	ii
<i>Outreach: Pengenalan Penyu Belimbing dan Usaha Konservasinya pada Sembilan Sekolah di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari</i>	1
<i>Cerita Lapang: Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNIPA Pada Kampung-kampung Pembelajaran UNIPA di Distrik Abun</i>	2
<i>Cerita Lapang: Kunjungan ke Pantai Peneluran Penyu Belimbing dan Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Tambrau</i>	3
<i>Training Enumerator: Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat di Selat Dampier</i>	4
<i>Pelayanan Kesehatan Massal di Distrik Abun Kabupaten Tambrau</i>	5
<i>Program RRI: Manokwari Menyapa di Bulan Juli 2017</i>	6
<i>Program RRI: Manokwari Menyapa di Bulan Agustus 2017</i>	7
<i>Cerita Noken Ilmu XV: Jasa Hutan yang Terlupakan</i>	10
<i>Noken Ilmu UNIPA ke XVI: "Impact Evaluation, The Details"; Examining the Social Impacts of MPAs in West Papua, Indonesia</i>	11
<i>Cerita Lapang: Kegiatan Survei Sosial di Selat Dampier</i>	12
<i>Survei Konsumen Bank Indonesia di Kabupaten Manokwari Perekrutan dan Pelatihan Surveyor di Bulan Agustus 2017</i>	13
<i>Data Management Training with Kelly Claborn</i>	14
<i>Pojok DP (Display Profil)</i>	15
<i>Seberapa Penting Data</i>	16
<i>Kontak Kami</i>	16

Sekilas Tentang

Divisi Pembangunan Berkelanjutan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Papua

Sejarah

Divisi Pembangunan Berkelanjutan dibentuk di Manokwari oleh UNIPA melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: SP-237/UN42/KP/2015 tentang Pembentukan Divisi-divisi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Papua pada 27 Juli 2015.

Visi dan Misi

Visi Divisi Pembangunan Berkelanjutan adalah menjadi pusat data dan informasi ilmiah yang mendukung proses pengambilan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Misi Divisi Pembangunan Berkelanjutan:

Penelitian dan monitoring yang relevan dengan kebijakan. Pada bagian ini akan diuji pertanyaan-pertanyaan kunci yang penting untuk pembangunan di Papua Barat.

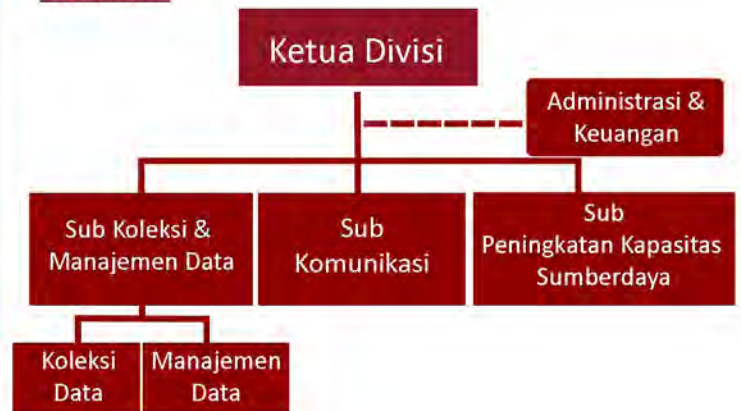
Peningkatan kapasitas, yang merujuk pada peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan internal CoE dan juga komunitas ilmiah yang luas.

Pengelolaan Pengetahuan yang menjelaskan tentang fasilitasi akses dan penggunaan data yang dihasilkan dari penelitian pembangunan yang berkelanjutan bagi ilmuwan data pengambil kebijakan.

Komunikasi akan difokuskan pada temuan penelitian yang relevan dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan kapasitas sumberdaya menjangkau audiens dalam UNIPA dan pada sektor pembangunan lainnya di Papua Barat.

Pengembangan intra organisasi yang merujuk pada peningkatan kapasitas CoE untuk mencapai visinya.

Struktur



Aktivitas

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Divisi Pembangunan Berkelanjutan:

Mengadakan pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas di lingkup UNIPA.

Menyelenggarakan seminar-seminar kecil sebagai wadah *sharing* informasi ilmiah (noken ilmu).

Menerbitkan *Newsletter* setiap 3 bulan sekali yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan oleh Divisi CoE.

Melakukan survei sosial di Kawasan Konservasi untuk mengetahui dampak pengelolaan suatu kawasan konservasi

Bekerjasama dengan LSM di Bentang Laut Kepala Burung dalam melakukan survei ekologi di Kawasan Konservasi

Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian yang terkait survei sosial yang telah dilakukan sejak 2010 kepada pemerintah daerah di kawasan konservasi.



Coe UNIPA



coe.lp2m@unipa.ac.id

+ 62 82248097263

OUTREACH: PENGENALAN PENYU BELIMBING DAN USAHA KONSERVASINYA PADA SEMBILAN SEKOLAH DI DISTRIK PRAFI, KABUPATEN MANOKWARI

Kartika W. Zohar
Sub Divisi Komunikasi

Pada pertengahan Juni 2017 (14-16 Juni), Universitas Papua melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan kunjungan pada 9 (sembilan) sekolah di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Tujuan kunjungan ini adalah memberikan informasi melalui penyuluhan tentang penyu belimbing dan upaya konservasinya yang telah dilakukan di Papua Barat. Terdapat 4 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas yang telah dikunjungi dengan total peserta mencapai 496 orang.

Kegiatan penyuluhan ini disajikan dengan cara pemberian materi melalui presentasi. Selain itu terdapat juga lomba-lomba dan aktivitas yang bertujuan untuk penguatan materi.

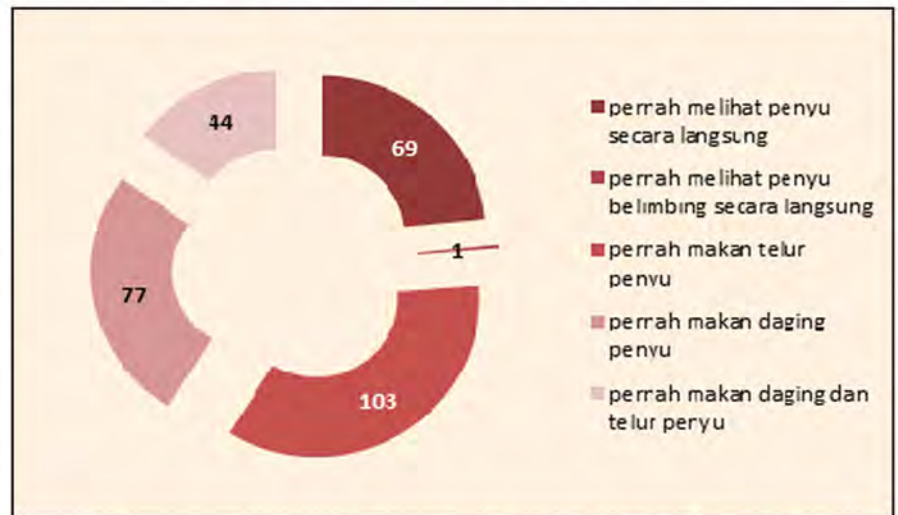
Pada awal kegiatan, tim penyuluh yang terdiri atas staf pengajar di UNIPA dan para mahasiswa serta tim outreach dari kegiatan pemantauan penyu selalu melakukan survei awal. Survei ini untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan interaksi peserta terhadap penyu, baik penyu belimbing maupun penyu dari jenis lainnya.

Terdapat 5 pertanyaan yang ditanyakan, yaitu: (1) Apakah pernah melihat penyu?, (2) Apakah pernah melihat penyu belimbing?, (3) Apakah pernah makan telur penyu?, (4) Apakah pernah makan daging penyu?, (5) Apakah pernah makan telur dan daging penyu?. Dari total peserta yang mengikuti kegiatan sekitar 21% diantaranya pernah mengonsumsi telur penyu, dan hanya 1 orang saja yang pernah melihat penyu belimbing secara langsung.

Upaya konservasi penyu untuk semua jenis memerlukan upaya yang komprehensif, mengingat penyu yang merupakan hewan migrasi.



Aktivitas outreach: penyampaian materi dan penilaian lomba membuat poster



Hasil pra-survei pengenalan penyu pada sembilan sekolah di Distrik Prafi

UNIPA memberikan kenang-kenangan kepada pihak sekolah berupa piagam peduli penyu dan materi penyuluhan yang dibuat dalam bentuk poster. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap sekolah-sekolah yang telah dikunjungi.

Akhirnya kami selalu berharap dari setiap kegiatan penyuluhan bahwa terdapat perubahan sikap ke arah yang lebih baik dalam upaya melestarikan satwa-satwa yang telah terancam punah, yang salah satunya penyu.



Penyerahan kenang-kenangan pada salah satu sekolah yang dikunjungi



CERITA LAPANG: KULIAH KERJA NYATA (KKN) PADA KAMPUNG-KAMPUNG PEMBELAJARAN UNIPA DI DISTRIK ABUN

Kartika Zohar
Sub Divisi Komunikasi

Pada akhir Juni 2017, UNIPA kembali mengirim 28 mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Sejak tahun 2013, UNIPA melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah rutin mengirim mahasiswa KKN di tiga kampung pada distrik ini setiap tahunnya.

Kegiatan KKN secara umum merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa UNIPA dengan bobot mata kuliah 4 SKS. 28 mahasiswa tersebar pada 4 kampung di Distrik Abun yaitu Kampung Waibem, Wau-Weyaf, Warmandi, dan Saubeba-Womom. Setiap kelompok terdiri atas 7 mahasiswa KKN dan 1 dosen pendamping lapang. Tim berangkat pada 22 Juni dan memulai aktivitas di setiap kampungnya.

Kampung-kampung yang terletak di Distrik Abun telah menjadi kampung pembelajaran dalam upaya konservasi terhadap penyu yang terbesar di dunia, yaitu penyu belimbing. Kampung-kampung ini mengapit 2 pantai utama peneluran penyu belimbing pasifik, Pantai Jamursba Medi dan Pantai Wermon. Kedua pantai ini merupakan pantai dengan aktivitas peneluran terbesar yang masih tersisa di pasifik, sekitar 75% aktivitas peneluran ada di kedua pantai ini.

Para mahasiswa KKN melaksanakan program-program yang telah terlebih dahulu direncanakan di kampus. Terdapat 7 bidang utama yang direncanakan yaitu: bidang pendidikan, pengolahan, pertanian, perikanan, agama, administrasi dan umum, serta lingkungan. Kemudian program yang telah disusun didiskusikan dengan masyarakat di lokasi KKN untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.



Kegiatan mengajar pada sore hari di rumah belajar

Kegiatan KKN berlangsung kurang lebih 60 hari (2 bulan), selama rentang waktu ini para mahasiswa KKN diharapkan dapat menyelesaikan semua program yang telah disepakati dengan masyarakat pada setiap lokasi KKN.

Distrik Abun dapat dijangkau dengan 2 moda transportasi yaitu melalui darat dan melalui laut. Perjalanan darat ditempuh dengan mobil selama kurang lebih 6 jam (untuk tiba di ibukota distrik, merupakan kampung terdekat dari Manokwari), sedangkan untuk mencapai Kampung Saubeba-Womom (kampung terjauh dari Manokwari) harus meneruskan perjalanan dengan menggunakan perahu milik masyarakat sekitar 2 jam perjalanan. Untuk moda transportasi laut, dapat ditempuh dengan menggunakan kapal perintis. Lama hari perjalanan yang dibutuhkan untuk tiba di kampung Saubeba selama 2 malam 3 hari. Secara ekonomi, moda transportasi melalui laut lebih murah yaitu Rp 50.000 perorang hingga tiba di Kampung Saubeba.

Untuk moda transportasi darat, penumpang harus merogok kantong hingga Rp 300.000/orang hanya untuk dapat tiba di ibukota distrik.

Keberadaan mahasiswa KKN mendapat sambutan hangat dari para masyarakat di setiap kampung. Masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran para mahasiswa ini, terutama dalam hal pendidikan. Para mahasiswa KKN membantu mengajar anak-anak SD di sekolah dan juga memberikan pelajaran tambahan pada sore hari. Selain pendidikan, para mahasiswa juga membantu pembuatan administrasi kampung, seperti papan ucapan selamat datang dan papan batas kampung.

"Kami berharap bahwa tahun depan, ada anak-anak yang bisa datang lagi di kampung kami, seperti ini" ujar salah satu kepala kampung pada acara penutupan kegiatan KKN.

CERITA LAPANG: KUNJUNGAN KE PANTAI PENELURAN PENYU BELIMBING DAN PERTEMUAN DENGAN BUPATI TAMBRAUW

Rivyelta Korwa
Sub Divisi Komunikasi

Pada pertengahan tahun 2017, tepatnya 14-19 Juli lalu, tim Abun melakukan kunjungan ke pantai peneluran Penyu Belimbing yang berlokasi di distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Kehadiran tim Abun menambah warna di Pantai Jamursba Medi yang telah diramaikan sebelumnya oleh tim pemantau penyu di lapang serta beberapa volunteer yang turut ambil bagian guna mengisi waktu luang mereka dengan menambah wawasan melalui pengetahuan tentang upaya perlindungan Penyu Belimbing yang didapati langsung di lapangan. Para volunteer ini bertugas membantu untuk mengambil data peneluran penyu belimbing di pos-pos yang telah ditentukan: pantai Jamursba Medi, Warmamed, dan Wembrak.

Sesekali kami mendengar obrolan para volunteer mengenai pengalaman-pengalaman mereka bertemu penyu belimbing di berbagai tempat namun tidak sebanyak di daerah Abun, "kalau di tempat kami penyu belimbing juga sering naik, hanya saja biasa masyarakat suka ambil telur dan dagingnya untuk dikonsumsi kemudian cangkang penyu dibuat menjadi kerajinan" papar salah satu volunteer. Hal ini terdengar ironi namun dapat menjadi kelegaan bahwa masih ada daerah yang aman untuk didatangi penyu belimbing yaitu Distrik Abun. Kegiatan yang mengajak volunteer untuk terjun langsung ke lokasi konservasi ini juga bertujuan untuk mengajak sebanyak mungkin orang terutama anak-anak Papua guna membantu upaya konservasi penyu belimbing.



Foto bersama tim di pantai peneluran

Pada hari selanjutnya tim melanjutkan perjalanan ke Sausapor untuk bertemu langsung dengan Bupati Kabupaten Tambrau sebagai upaya membangun kerja sama antara LPPM UNIPA, donatur, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan upaya konservasi di daerah Abun. Pertemuan tersebut berisikan tentang pemaparan program oleh Ibu Fitriyanti Pakiding selaku Manajer Program dan dilanjutkan oleh Mrs. Manjula sebagai penasihat teknis program. Bupati Tambrau memberikan respon positif serta antusiasme dengan program-program yang ditawarkan dari LPPM UNIPA kepada pemerintah daerah Kabupaten Tambrau terkait peningkatan Sumber daya manusia

(SDM) PNS di Kabupaten Tambrau-Distrik Abun serta rencana pembentukan BLUD di Kabupaten Tambrau. Sebagai wujud keseriusannya, beliau juga memaparkan bahwa saat ini pemerintah sedang membangun sarana transportasi darat sehingga akses menuju kampung-kampung terutama kampung di daerah konservasi lebih mudah. "Jika akses transportasi darat sudah baik, maka kita dapat menjangkau masyarakat dengan mudah, program-program yang telah direncanakan pun akan dengan cepat diaplikasikan kepada masyarakat", tegasnya.



Foto bersama Tim Pemantauan Penyu Belimbing dengan Pemda Kabupaten Tambrau

TRAINING ENUMERATOR:

MONITORING SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SELAT DAMPIER

Maya Paembonan
Sub Divisi Manajemen Data

Universitas Papua bekerja sama dengan RARE melakukan monitoring sosial ekonomi masyarakat di Selat Dampier tahun 2017. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang pertama dilakukan. UNIPA sebagai penyelenggara kegiatan melakukan seleksi calon enumerator. Dari 32 orang yang mendaftar dan mengikuti tes wawancara, dipilih 12 orang yang layak untuk mengikuti training. Training dilakukan pada tanggal 2-7 Agustus 2017 pada hari kerja, berlangsung dari pukul 09.00-16.00 WIT di ruang rapat Divisi Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Dr. Nurhaidah Sinaga selaku ketua LPPM. 12 calon enumerator yang mengikuti training terdiri dari mahasiswa dan alumni Universitas Papua. Beberapa materi training yang disampaikan antara lain pengenalan tentang survei dan kuisiонер yang dijelaskan oleh ibu Dr. Fitrianti Pakiding dan Dahlia Manufandu, S.Si, sementara untuk manajemen data dijelaskan oleh ibu Dariani Matualage, M.Si.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah enumerator wajib memahami dan dapat menyampaikan dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuisiонер kepada responden. Dari 83 pertanyaan yang termuat pada kuisiонер, 11 diantaranya merupakan pertanyaan tambahan dari RARE. Dengan jumlah pertanyaan yang banyak, enumerator diharapkan dapat tetap fokus bukan hanya pada saat menyampaikan pertanyaan tetapi juga memahami jawaban yang disampaikan oleh responden. Sementara itu pada manajemen data, dua hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat pembersihan dan input data, pada tahap ini jika ada data yang dianggap kurang masuk akal maka dapat dilakukan pengecekan kembali.

Selain itu untuk lebih melatih keterampilan enumerator di lapangan dan untuk mengukur pemahaman mereka selama mengikuti training, maka pada hari Jumat, 4 Agustus dilakukan *field test* yang bertempat di Sowi IV. Dalam kegiatan tersebut peserta dibagi menjadi lima tim, setiap tim mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai 2 rumah tangga sehingga terdapat 10 rumah tangga. Pemilihan rumah tangga dilakukan secara acak, sehingga setiap rumah tangga memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Hasil dari *field test* menunjukkan bahwa secara umum peserta sudah cukup paham, namun demikian ada beberapa hal menyangkut pengisian kuisiонер yang perlu diperbaiki kembali.

Pada akhirnya empat orang terpilih yang akan turun ke lapangan melakukan survei. Pemilihan keempat orang tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan selama masa training. Tim akan dibagi menjadi dua kelompok dengan masing-masing kelompok mempunyai *field coordinator*. Kegiatan training yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pembekalan pengetahuan maupun keterampilan yang cukup sehingga ketika melakukan survei di lapangan kesulitan ataupun kendala dapat diminimalkan. Survei dilakukan pada tanggal 15-25 Agustus 2017.



Foto Bersama dengan Peserta Training



Kegiatan Training Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat di Selat Dampier

PELAYANAN KESEHATAN MASSAL DI DISTRIK ABUN KABUPATEN TAMBRAUW

Alberto Y. T. Allo
Sub Divisi Komunikasi

Menyadari pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam bagi generasi di masa mendatang, Provinsi Papua Barat pada bulan Oktober 2015 mencanangkan diri sebagai provinsi konservasi. Menjadi provinsi konservasi bukan berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam baik hayati maupun non-hayati tidak lagi bisa dilakukan. Melainkan, menjadi provinsi konservasi berarti bahwa dalam setiap upaya pemanfaatan sumberdaya alam, seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Provinsi Papua Barat saat ini, tanpa melupakan generasi mendatang.

Walaupun memiliki sumberdaya alam yang melimpah, potret sosial masyarakat di Provinsi Papua Barat tidaklah seindah potret kekayaan sumberdaya alamnya. Saat ini Provinsi Papua Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah, dan tingkat pembangunan infrastruktur rendah.

Tulisan ini sebagai bentuk berbagi informasi pada bidang kesehatan dari pembelajaran Divisi Pembangunan Berkelanjutan LPPM UNIPA menjalankan pelayanan kesehatan massal di Distrik Abun Kabupaten Tambrau yang masyarakatnya hidup terisolir namun memiliki peran strategis dalam upaya konservasi Penyu belimbing.

Pelayanan kesehatan massal yang terselenggara pada tanggal 22-25 Juni 2017 atas kerjasama Tim UNIPA berjumlah 4 orang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau

berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 dokter, 1 kepala puskesmas Abun, 3 bidan, 2 suster. Pelayanan kesehatan massal ini dilaksanakan selama 4 hari dengan mengunjungi kampung-kampung yang ada di Distrik Abun. Kunjungan hari pertama dan kedua di kampung Saubeba dan kampung Womom. Hari ketiga di kampung Wau-Weyaf, dan hari keempat di kampung Warmandi. Pelayanan kesehatan massal ini telah menjangkau sebanyak 283 orang, yang terdiri dari 106 orang di kampung Saubeba dan Womom, 126 orang di kampung Wau-Weyaf, dan 51 orang di kampung Warmandi. Dari pelayanan tersebut ditemukan pada umumnya usia 0-12

kebanyakan sakit batuk-flu, usia 25-60 kebanyakan sakit pegal-pegal karena kerja berat, 8 orang positif malaria, dan 7 orang yang *urgent* dirujuk ke rumah sakit.

Kendala yang dialami selama pelayanan kesehatan massal antara lain: Keterbatasan obat-obatan diantaranya obat tetes telinga dan obat mata. keterbatasan alat penguji malaria dan peralatan medis lainnya. Harapannya setiap tenaga medis yang telah ditempatkan bekerja pada kampung-kampung tersebut untuk tetap berada di kampung menjalankan tugas tanggungjawabnya sehingga kebutuhan dasar kesehatan masyarakat minimal dapat terpenuhi.



Pelayanan Kesehatan di Kampung Warmandi



Tim UNIPA dan tim kesehatan siap berangkat dari Sausapor menuju Saubeba

PROGRAM RRI:

MANOKWARI MENYAPA DI BULAN JULI 2017

Kharisma Saragih
Sub Divisi Komunikasi

Pada bulan Juli tahun 2017, Divisi Pembangunan Berkelanjutan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIPA kembali menghadirkan pembicara dari Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) UNIPA untuk berdialog interaktif pada program RRI "Manokwari Menyapa" edisi konservasi ke-XVI. Dialog interaktif tersebut berlangsung selama 1 jam yang dimulai dari jam 08.00 – 09.00 WIB pada tanggal 27 Juli 2017 tepatnya. Program tersebut merupakan kerjasama antara Divisi Pembangunan berkelanjutan LPPM UNIPA dan RRI Manokwari. Selain itu dengan adanya dukungan dari Sekretariat Bersama Benteng Laut Kepala Burung (BLKB) sehingga program ini menjadi semakin berjalan lancar.

Edisi kali ini berjudul tentang "Potensi Pemanfaatan Pokem sebagai Bahan Baku Pangan Baru". Pembicara pada edisi ini adalah Isak Silamba, S.TP., M.Si juga merupakan Dosen dari Fateta UNIPA. Dialog kali ini mengulas tentang Pokem (*Setaria italica* L. Beauv) merupakan tanaman sereal yang penghasil karbohidrat yang telah lama dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor Papua. Pak Isak (Sapaan dari Penyiar RRI Manokwari Menyapa) menjelaskan masyarakat Papua sering menyebut tanaman pokem sebagai gandum Papua.

Lebih lanjut pak Isak mengatakan pokem juga tumbuh di daerah luar Papua namun dikenal dengan nama yang berbeda, di Maluku masyarakat mengenal pokem dengan nama hotong dan di Jawa di kenal dengan nama juwawut. Menurut pak Isak berdasarkan beberapa literatur yang diketahuinya dan informasi dari masyarakat setempat di Pulau Numfor,

terdapat lima jenis pokem yang dibudidayakan dan diberi nama dengan Bahasa daerah setempat. Perbedaan dari ke-lima jenis pokem ini dapat dilihat dari warna pada bijinya. Nama-nama pokem tersebut adalah Pokem coklat (resyek), pokem merah (verik), pokem putih (vepyoper), pokem hitam (vepaisem) dan pokem kuning (venanyar). Dialog semakin menarik lagi setelah pak Isak menjelaskan pemanfaatan pokem oleh masyarakat yang bermukim di daerah Papua. Beberapa pemanfaatannya yaitu sebagai makanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil dan makanan tambahan bagi anak balita.

Di Numfor pokem telah dibuat produk seperti bubur pokem dan waji. Kandungan nutrisi pada biji pokem tergolong tinggi, kandungan protein biji pokem lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman sereal lain seperti beras, gandum dan jagung. Dialog ini lebih dalam lagi mengulas tentang kandungan gizi makro dan mikro biji pokem yang cukup tinggi dibandingkan tanaman sereal lainnya. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dan dari beberapa referensi penelitian yang pak Isak ketahui energi yang dihasilkan dari 100 gram biji pokem yaitu 359 kkal.

Selain kandungan nutrisi yang tinggi, pak Isak menjelaskan dari aspek budidaya pokem juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti kemampuan beradaptasi yang baik terhadap lingkungan yang kering, serta tidak memerlukan perawatan khusus seperti tanaman sereal lain.

Diakhir dialog interaktif pak Isak mengatakan bahwa dari tiga genotipe pokem yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat tidak terdapat perbedaan nyata sifat fisiko-kimia ketiga genotipe pokem tersebut. Penjelasan pak Isak ini telah dibuktikan dari penelitian yang telah dilakukannya bersama beberapa Dosen FATETA UNIPA yaitu dari hasil penelitian Isak Silamba dkk., (2016). Menurut pak Isak hal ini sangat berpotensi sebagai alternatif pangan dimasa mendatang dan dapat berkelanjutan. Namun tutur pak Isak, perlu dilakukan inovasi diversifikasi produk pangan baru menggunakan pokem sebagai bahan baku utama sehingga akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta tingkat penerimaan pokem.



Diskusi dan foto bersama pembicara Manokwari Menyapa, Isak Silamba, M.Si

Program RRI – Manokwari Menyapa di Bulan Agustus 2017

Kharisma Basana Saragih¹, Evangelista Randa¹
Sub Divisi Komunikasi

Program Manokwari Menyapa di bulan Agustus 2017 kembali mengudara dengan menyajikan dua edisi. Manokwari Menyapa edisi ke-XVII dibawakan oleh Jimmy F. Wanma, S.hut., M.App.Sc dengan mengangkat judul yang sangat menarik yaitu "Peranan Hutan Gunung Meja sebagai Hutan Kota Manokwari", Selain itu di edisi ke-XVIII pada tanggal 10 Agustus 2017 Manokwari Menyapa menyajikan sebuah judul "Konservasi Keanekaragaman Jenis Burung Endemik Papua" dengan pembicara Ir. Agust Kilmaskossu, M.Si yang membuat pendengar setia bernalang dan mengingat kembali suara burung yang indah di masa lalu di Kota Manokwari.

Edisi ke-XVII pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan pembicara Jimmy F. Wanma, S.hut., M.App.Sc berlangsung sangat menarik karena judul yang dibawakan dalam dialog interaktif RRI Manokwari kali ini berhubungan dengan hutan Gunung Meja yang dikenal masyarakat kota Manokwari merupakan Taman Wisata Alam. Pak Jimmy (Sapaan dari Peniar RRI Manokwari Menyapa) merupakan Dosen dari Fakultas Kehutanan UNIPA yang telah melakukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan hutan Gunung Meja sehingga edisi ini sangat memikat pendengar setia Manokwari Menyapa karena dialog yang dibawakan pameri memberikan banyak informasi penting yang belum diketahui mengenai hutan Gunung Meja.

Pak Jimmy memulai dialog dengan menjelaskan kawasan Gunung Meja. Gunung meja merupakan suatu kawasan hutan hujan tropis dataran rendah yang menyusun formasi hutan pantai Utara Papua dan merupakan

salah satu kawasan konservasi pada daerah Vogel kop (kepala Burung) Papua.

Lebih lanjut pak Jimmy menjelaskan Gunung Meja sebagai Hutan Kota yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan di Kota Manokwari, sehingga kota Manokwari akan tetap menjadi kota yang nyaman untuk di huni oleh seluruh warga masyarakat Manokwari. Berdasarkan Departemen Kehutanan RI, ada 24 Fungsi hutan kota yang sangat berguna bagi warga masyarakat yang hidup di daerah perkotaan. Dari sekian banyak fungsi tersebut ada sekitar 5 fungsi yang diperankan oleh Hutan Gunung Meja bagi kota Manokwari. Pak Jimmy mengulas ke-5 fungsi tersebut secara singkat padat dan jelas kepada pendengar Manokwari Menyapa. Fungsi ke-1 sebagai pelestarian Plasma Nutan yang berperan sebagai perlindungan terhadap hutan Gunung Meja secara tidak langsung akan melindungi Tumbuhan dan Stawa yang berada pada hutan tersebut, fungsi ke-2 sebagai penyerap karbon-dioksida/mono oksida dan penghasil oksigen,

fungsi ke-3 sebagai Pelestarian Air Tanah, fungsi ke-4 sebagai Habitat Satwa dan fungsi ke-5 dapat mengurangi stress dengan cara menikmati keindahan alam dan berekreasi.

Perlu diketahui merupakan hak setiap warga kota Manokwari untuk menerima manfaat yang disediakan oleh hutan gunung meja seperti ketersediaan air bersih dan udara yang segar. Agar supaya manfaat itu dapat terus dinikmati oleh kita maupun generasi sesudah kita yang hidup di kota Manokwari maka sebagai warga kota Manokwari kita wajib untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap terhadap kelestarian hutan Gunung meja. Diakhir dialog pak Jimmy mengatakan "Semoga dengan usaha bersama warga Kota Manokwari dan semua stakeholder yang berperan dalam pengelolaan hutan gunung meja maka diharapkan Peranan Gunung Meja sebagai Hutan Kota akan terus dirasakan oleh generasi generasi yang akan datang".



Diskusi manokwari menyapa bersama pembicara Jimmy F. Wanma

Edisi ke-XVIII pada tanggal 3 Agustus 2017 diisi oleh pembicara dari Dosen Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNPA yaitu Ir. Agust Kilmaskossu, M.Si. Materi yang dibawa kali ini juga menarik pendengar setia Manokwari Menyapa. Mengingat tahun-tahun sebelumnya ketika kota Manokwari yang dihibur dengan nyanyian kicauan burung dipagi hari, namun sungguh ironi dengan adanya pembangunan yang cukup meningkatkan sehingga pembukaan lahan di beberapa titik yang menjadi tempat pesinggahan burung-burung menyebabkan rumah hewan tersebut rusak, jelas pak Agust pada dialog interaktif kali ini.

Lebih dalam lagi, pak Agust mengulas mengenai burung endemik Papua. Dalam Buku Ekologi Papua (2012) jumlah jenis burung di kawasan Nugini (Pulau New Guinea) dinyatakan ada sebanyak 831 jenis, dimana 657 diantaranya terdapat di Papua (NKRI). Dengan kata lain hampir separuh atau sekitar 41% dari jumlah burung di Indonesia tinggal di Papua, suatu jumlah yang cukup signifikan. Papua tidak hanya memiliki kekayaan jenis (*species richness*) yang tinggi, tetapi juga memiliki tingkat endemisitas jenis (*species endemism*) yang tinggi pula. Endemisitas burung Papua merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia.

Dari sekitar 426 spesies burung endemik Indonesia, lebih dari 50 jenis tersebar terbatas (*endemik*) di pulau Papua. Pak Agust juga menjelaskan apa itu burung endemik. Berdasarkan referensi yang ada, burung endemik adalah burung dengan sebaran terbatas yang secara alami hanya mendiami wilayah tertentu. Burung endemik tidak ditemukan di daerah lain.

Burung endemik Indonesia adalah burung yang daerah sebarannya terbatas hanya di Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain. Burung endemik Papua, berarti jenis burung tersebut hanya hidup di Papua saja. Demikian pula burung endemik Pegunungan Arfak hanya tercatat keberadaannya di Pegunungan Arfak atau burung endemik Pulau Biak artinya jenis burung tersebut hanya bisa ditemukan di pulau Biak. Diakhir dialog pak Agust menjelaskan mengenai upaya penanggulangan terhadap ancaman-ancaman burung endemik di Papua.

"Upaya penanggulangannya adalah mereduksi atau mengurangi Pemanfaatan burung secara tradisional dan subsisten, Pembalakan hutan untuk industry, Konservasi lahan untuk pertanian, Perdagangan burung dan Introduksi atau mencegah jenis spesies dari burung asing masuk.

Edisi Senin, 21 Agustus 2017, mengundang Jonni Marwa, S.Hut, M.Sc yang merupakan staf dosen di Fakultas Kehutanan menjadi narasumber dalam Program Manokwari Menyapa yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dengan topik Hutan Adat :

Akses Kelola Masyarakat di Papua yang "Terabaikan".

Perbincangan berlangsung dengan menarik dan interaktif. Pak Jonni berbagi banyak informasi tentang hutan adat di Papua yang telah dikonsesikan dengan berbagai bentuk pemanfaatan tanpa memberikan manfaat yang "adil dan aman" bagi masyarakat adat. Fakta ini menyebabkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan gugatan ke pemerintah sehingga lahir keputusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Sebelum dibacanya putusan tersebut, hutan adat termasuk dalam kategori hutan negara. Artinya segala pengelolaan hutan, termasuk pengelolaan berada di tangan pemerintah, bukan masyarakat adat. Diskusi yang berlangsung sekitar 1 jam ini memberikan informasi berharga tentang adanya target 12,7 juta hektar kawasan hutan yang akan diberikan presiden sebagai akses kelola kepada masyarakat dimana sampai dengan bulan April 2017 baru mencapai 13,17% (Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2017).



"When I was younger, carrier pigeons like me were on the cutting edge of wireless communication technology. Unfortunately, I never bothered to update my training!"

Lanjutan: Program RRI – Manokwari Menyapa di bulan Agustus 2017

Dari jumlah tersebut akses kelola untuk hutan adat di Papua berkontribusi hanya 0,10% terhadap keseluruhan akses, dan wilayah Papua belum ada satupun hutan adat yang ikut bersaing dalam kompetisi akses kelola ini. Padahal, jangka waktu kebijakan ini hanya sampai tahun 2019. Mengapa belum ada masyarakat adat di wilayah Papua yang mengajukan skema hutan adat untuk memperoleh akses kelola dari pemerintah? Mungkinkah ada perwakilan masyarakat adat Papua yang akan mendaftar akan berproses untuk mengikut skema hutan adat dalam jangka waktu dua tahun sisa?.

Dalam perbincangan ini juga membahas apa manfaat penetapan hutan adat bagi masyarakat adat. Lebih jelas Pak Jonni menyampaikan bahwa manfaat yang utama ialah adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, dan pengakuan wilayah adat.

Terkait hal ini, Jonni Marwa juga memberikan saran terhadap pembangunan hutan adat di Papua akan berhasil bila beberapa hal berikut ini diperhatikan, yang pertama adalah penyamaan visi pembangunan masyarakat adat diantara para pemangku kepentingan. Kemudian berikut adalah komitmen pemerintah daerah yang kuat sebagai “ujung tombak” dengan didukung para pihak. Selanjutnya yaitu, dengan membentuk SKPD dan/atau bidang dan seksi yang bertanggung jawab terhadap masyarakat adat dan hutan adat.

Pengakuan tersebut secara langsung juga mengakomodir pengakuan hak-hak tradisional dan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat. Disamping itu, setiap orang atau kelompok marga yang memiliki hak kelola hutan hak berdasarkan Permen-LHK nomor P.32/Men-LHK/2015 mendapat kompensasi dan insentif.

Kemudian bagi kabupaten kota yang sementara menyusun revisi RTRWK dapat memperhitungkan untuk memasukan peta indikasi hutan adat. Terdapat tiga orang penelpon yang memberikan tanggapannya mengenai topik tersebut. Di akhir perbincangan, Pak Jonni memberikan pesan penutup yaitu pembangunan hutan adat di Papua sampai saat ini masih terabaikan dalam tugas-tugas pemerintahan daerah. Hal ini berkaitan dengan kompleksitas persoalan hutan adat dan ketersediaan regulasi. Namun demikian pemerintah daerah harus berusaha untuk memulai dan membangun sejumlah pilot projek di Papua dan Papua Barat.



Diskusi dan foto bersama dengan pembicara Manokwari Menyapa, Jonni Marwa

CERITA NOKEN ILMU XV : JASA HUTAN YANG TERLUPAKAN

Rivyelta Korwa
Sub Divisi Komunikasi

Kamis, 10 Agustus 2017, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kembali mengadakan seminar ilmiah noken ilmu yang ke-XV dengan tema: Menenal Nilai Jasa Lingkungan, bertempat di Auditorium (Fakultas Kehutanan UNIPA) pada pukul 08.00–11.00 yang dihadiri 46 orang pelajar, 3 orang guru pendamping, 5 orang mahasiswa, 2 orang dosen dan 1 orang alumni dengan pemateri: Ir. Max J. Tokede MS.

Pada kegiatan yang dimaksud beliau memaparkan tentang jasa –jasa hutan yang sering diabaikan manusia seperti sebagai sumber O₂ dan air bersih, penangkal angin, pencegah terjadinya bencana alam, misalnya tsunami, longsor, banjir, erosi, abrasi dan masih banyak lagi. “Sering kali manusia lupa bahwa hutan merupakan bagian penting yang harus tetap ada guna menstabilkan keadaan lingkungan sehingga dengan mudahnya manusia mengalihfungsikan hutan untuk keperluan konsumtif tanpa memberikan ruang bagi hutan untuk melakukan tugasnya” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut ada juga beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa peserta seperti andil pemerintah untuk melindungi hutan sehingga fungsi hutan tidak dialihkan dengan mudahnya dimana kegiatan tersebut akan menimbulkan masalah-masalah alam seperti yang telah disebutkan di atas. Pada kesempatan tersebut pemateri menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini dinas Kehutanan berfungsi untuk mengatur bagian-bagian hutan mana yang dapat dialihfungsikan sebagai pemukiman-perkantoran dan tidak dapat dialihfungsikan.



Penyampaian Materi Noken Ilmu

Selain itu, polisi hutan juga bertugas untuk mendisiplinkan hal tersebut dilapangan, namun birokrasi serta kongkalikong yang sering terjadi di balik layar menyebabkan semua fungsi serta pembagian-pembagian wilayah bisa menjadi abu-abu sehingga timbulah berbagai macam masalah alam di area pemukiman yang tidak terdapat hutan lagi.

Dr. Ir Max Tokede, MS memaparkan bahwa “Tidak hanya sebagai pencegah kerusakan alam, hutan juga dapat berfungsi ekonomis jika dimanfaatkan serta diberdayakan dengan baik dan benar. Beberapa bagian hutan yang dapat diberdayakan antara lain kayu yang nantinya akan diolah menjadi berbagai hasil hutan seperti tripleks, balok, papan, dsb. Hal ini tentunya dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan menambah penghasilan warga di daerah sekitar hutan.

Hutan tidak hanya berjasa bagi manusia, namun juga makhluk hidup lainnya yaitu hewan yang tinggal dan berekosistem di dalamnya.

Hutan menjadi sumber makanan bagi berbagai jenis hewan seperti bangsa aves, amphibi, mamalia, arthropoda, reptil, dsb.

Hutan merupakan rumah bagi semua makhluk hidup sehingga keberadaannya harus tetap dilindungi. Tanpa hutan siklus kehidupan alam akan rusak dan menimbulkan berbagai kerusakan ekosistem sehingga manusia maupun makhluk hidup lainnya akan kehilangan sumber-sumber kehidupannya.



Foto bersama peserta dan pemateri

NOKEN ILMU UNIPA KE- XVI: "IMPACT EVALUATION, THE DETAILS"; EXAMINING THE SOCIAL IMPACTS OF MPAS IN WEST PAPUA, INDONESIA.

Dariani Matualage

Sub Divisi Koleksi dan Manajemen Data



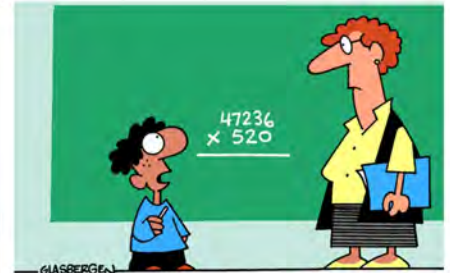
Foto bersama pembicara setelah kegiatan Noken Ilmu

Pendirian Kawasan Konservasi Perairan (KKP) menimbulkan perdebatan antara pendukung dan penentang KKP. Menurut para pendukung, KKPP memberikan manfaat untuk "ikan" dan "masyarakat", sedangkan menurut para penentang, KKP hanya mementingkan "ikan" dibandingkan "masyarakat".

Selama ini belum ada cukup bukti yang mampu menjawab perdebatan tersebut. Untuk itu perlu adanya penelitian mengenai dampak pendirian KKP terhadap kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar KKP.

Bagaimana proses evaluasi dampak pendirian KKP khususnya KKP yang berada di Bentang Laut Kepala Burung (BLKP) Papua? Hal inilah yang dibahas dalam Noken Ilmu UNIPA ke-XVI yang dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2017 dengan judul "Impact Evaluation, The Details: Examining the Social Impacts of MPAs in West Papua, Indonesia" oleh Kelly Claborn dari WWF-US dan moderator Dr. Fitryanti Pakiding.

Pemaparan mengenai evaluasi dampak KKP ini dimulai dari penjelasan mengenai pengertian



"AREN'T THERE ENOUGH PROBLEMS IN THE WORLD ALREADY?"

"dampak", indikator sosial ekonomi yang digunakan untuk mengukur dampak pendirian KKP di BLKB Papua, metode-metode statistika dan variabel yang digunakan untuk memperoleh sampel yang menggambarkan keadaan sebelum dan sesudah pendirian KKP, model pendugaan serta kemungkinan-kemungkinan hasil dampak yang dapat diperoleh.

Kegiatan ini diikuti oleh 16 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa, alumni dan dosen UNIPA. Para peserta akan memperoleh sertifikat sebagai peserta dalam kegiatan ini.



Pemaparan materi oleh Kelly Claborn

CERITA LAPANG:

KEGIATAN SURVEI SOSEK DI SELAT DAMPIER

Joice Pangulimang

Sub Divisi Manajemen Data

Daerah Perlindungan Laut atau Marine Protected Area (MPA) adalah salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya laut yang bertujuan untuk pengelolaan perikanan dan konservasi sumberdaya hayati. Dengan adanya MPA, maka sumberdaya laut dapat terpelihara dengan baik. Namun bagaimana dengan kesejahteraan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Universitas Papua (UNIPA) bekerjasama dengan WWF US dalam rangka melaksanakan monitoring mengenai dampak sosial keberadaan MPA.

Monitoring sosial dilakukan sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 di 6 MPA yaitu MPA Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Kaimana, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Kofiau dan Misool. Kegiatan monitoring ini mencakup tingkat pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemberdayaan politik dan budaya masyarakat daerah pesisir. Pada tahun 2017 kembali dilakukan monitoring sosial di MPA Selat Dampier yang merupakan kerjasama antara UNIPA dan RARE, yang mencakup kondisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemberdayaan politik, budaya dan pengelolaan perikanan adat.

Survei sosial ini berlangsung selama 13–24 Agustus 2017 yang diikuti oleh 6 orang tim UNIPA yang terdiri dari 2 orang koordinator lapang dan 4 orang enumerator. Tim melakukan kegiatan survei di kampung pertama yaitu Sakabu selama 2 hari dikarenakan cuaca hujan dan masyarakat sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan 17 Agustus. Hasil yang diperoleh dari Sakabu sebanyak 20 responden.

Kampung kedua yang dikunjungi oleh tim adalah Samate dengan hasil wawancara sebanyak 20 kepala keluarga. Tim berada selama 2 hari di Samate karena cuaca hujan dan masyarakat sibuk dengan kegiatan-kegiatan menyambut hari Raya Kemerdekaan RI. Ketika tanggal 17 Agustus, tim masih berada di Samate sehingga tim juga mengikuti upacara hari merdeka bersama pemerintah setempat, para guru, peserta didik dan masyarakat sekitar Samate. Kapatlap adalah kampung ketiga yang didatangi oleh tim, selanjutnya adalah kampung Solol, Kalias, Weilebet, Yenanas dan terakhir adalah Yensawai. Secara berturut-turut hasil yang diperoleh pada keenam kampung tersebut sebanyak 20 responden, 16 responden, 7 responden, 15 responden, 15 responden dan 15 responden. Dari pengamatan langsung di lapangan, potret sederhana yang dapat disampaikan adalah sebagian besar masyarakat yang berada

di Sakabu, Samate dan Kapatlap memilih melaut sebagai sumber pendapatan keluarga, sedangkan di Solol, Kalias, Weilebet, Yenanas dan Yensawai lebih memilih bertani untuk sumber pendapatan.

Dari segi pendidikan, semua kampung tersebut sudah memiliki sekolah dasar meskipun hanya beberapa kampung yang memiliki sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sederajat. Juga sudah tersedia Pustu dan Puskesmas walaupun puskesmas hanya di beberapa kampung.

Adapun kesulitan yang dialami oleh tim ketika berada di lapangan adalah beberapa keluarga menolak untuk di survei, ada juga keluarga-keluarga yang keluar dari kampung untuk jangka waktu tertentu serta ada sedikit masalah antar sesama warga dalam satu kampung.



Wawancara oleh Allan Ambrau di Kampung Yensawai

SURVEI KONSUMEN BANK INDONESIA DI KABUPATEN MANOKWARI PEREKRUTAN DAN PELATIHAN SURVEYOR DI BULAN AGUSTUS 2017

Kharisma Saragih
Sub Divisi Komunikasi

Kegiatan Survei Konsumen (SK) merupakan kerjasama antara Divisi Pembangunan Berkelanjutan LPPM UNIPA dengan Bank Indonesia Kabupaten Manokwari. Perekrutan dan pelatihan surveyor kembali dilakukan untuk mencari tenaga pengumpul data yang memiliki kapasitas dan integritas diri yang sesuai pada pekerjaan ini. Alasan dilakukannya perekrutan karena kinerja surveyor beberapa bulan terakhir semakin menurun.

Perekrutan surveyor dimulai dengan menyebarkan pengumuman di setiap fakultas yang berada di UNIPA dan melalui media sosial facebook. Pengumuman perekrutan dipublikasikan dari tanggal 14 – 18 Agustus 2017. Jumlah pelamar yang memasukkan berkas sebanyak 33 orang. Selang beberapa hari setelah waktu perekrutan ditutup, pengumuman bagi yang lolos seleksi administrasi dikeluarkan dan ditempel pada pintu masuk kantor Divisi Pembangunan Berkelanjutan.

Tahap selanjutnya dilakukan wawancara kepada 21 pelamar yang telah lolos seleksi administrasi. Interviewer yang bertugas untuk mewawancarai pelamar merupakan peneliti-peneliti Survei Konsumen. Setelah wawancara selesai, interviewer memilih dan menentukan pelamar mana yang layak untuk menjadi surveyor kemudian beberapa hari kemudian hasil wawancara diumumkan ke setiap pelamar.

Pelatihan surveyor dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2017. Jumlah pelamar yang lolos wawancara dan mengikuti pelatihan sebanyak 15 orang, namun surveyor yang datang pada pelatihan berjumlah 12 orang. Kegiatan pelatihan surveyor dimulai dengan pembukaan dari sekretaris kegiatan yaitu Wilson Palelingan Aman, S.TP., M.Si.

Beberapa arahan diberikan pak Wilson dan menceritakan tentang awal mula project survei ini dipercayakan Bank Indonesia kepada UNIPA.

Pembukaan berlangsung dengan singkat namun banyak penjelasan yang bermanfaat sehingga surveyor lebih memahami maksud dan tujuan dilaksanakannya project ini. Materi selanjutnya dari peneliti Survey Konsumen yaitu Indah Ratih Anggriyani, S.Si, M.Si tentang sosialisasi kuisisioner. Materi ini lebih fokus pada pemahaman tentang pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam kuisisioner.

Materi terakhir dibawakan oleh Kordinator Lapangan Kharisma Basana Saragih, S.TP yang mengulas tentang tata cara pengisian kuisisioner dan syarat-syarat responden yang dapat diwawancarai.



Pembukaan Kegiatan Pelatihan



Tahap seleksi wawancara

DATA MANAGEMENT TRAINING WITH KELLY CLABORN

Jouhannes Faidiban
Sub Divisi Manajemen Data

Sebagai bentuk *information & knowledge transfer* antara CoE dan WWF (US), maka pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus WWF mendatangkan Kelly Claborn, data analis WWF-US untuk program Bird's head Seascape(BHS) Social dan Ecological Monitoring and Evaluation (M&E) untuk melakukan Pelatihan Manajemen Data. Kegiatan yang bertempat di ruang rapat Divisi Pembangunan Berkelanjutan ini diikuti oleh empat orang staff yakni Dariani Matualage S.Si, M.Si, Indah Ratih Aggraini S.Si, Maya Paembonan S.Si, M.Si dan Jouhannes Faidiban yang akan mengelolah data BHS Social M&E. Selain bertujuan untuk membangun kapasitas staff divisi, tujuan pelatihan ini agar adanya sinkronisasi dalam transforming, storing, validating and protecting data antara Divisi Pembangunan Berkelanjutan dan WWF.

Pembukaan kegiatan Pelatihan manajemen data dilakukan oleh Ketua Divisi Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Fitryanti Pakiding. Mengawali pelatihan, Kelly Claborn menjabarkan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama sepekan. Dalam penyampaian Kelly memberi ruang untuk saran atau masukan dari keempat peserta untuk agenda setting. Dalam Pelatihan ini terdapat 2 tahapan utama yaitu penggabungan data dan analisis data. Penggabungan data dilakukan menggunakan Microsoft Access dan Excel, sementara untuk analisis data menggunakan RStudio. Antusiasme terlihat dari semua pihak peserta yang banyak mengajukan pertanyaan dan juga dari Kelly yang memberikan support perorangan.



Kegiatan Pelatihan Manajemen Data

Kegiatan diakhiri dengan Dr. Pakiding merangkumkan seluruh rangkaian kegiatan, mengulas materi yang telah diberikan dan menyusun rencana kedepan antara tim data Divisi Pembangunan Berkelanjutan dan WWF. Dengan mengutarakan kembali komitmen untuk bekerjasama, intensitas komunikasi yang disepkati oleh kedua belah pihak serta

Dr. Pakiding menutup seluruh rangkaian acara di ruang tempat pelatihan pada pukul 17.30 WIT. Kegiatan ramah-tamah kemudian dilanjutkan pada malam hari di kediaman Dr. Pakiding.

Copyright 2002 by Randy Glasbergen. www.glasbergen.com



"I need one Pepsi, one Coke, one 7-Up, one large coffee, one small coffee, one mint tea, one green tea, one iced tea, one orange juice, one bottled water, and one nonalcoholic Fuzzy Navel. They're for our Diversity Committee."



Jan Hendrik Nunaki, S.Pd., M.Si

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Papua

Tempat Tanggal Lahir: Nabire, 11 Januari 1976

Pendidikan :

S1 : Universitas Cendrawasih (1995 – 2000)

S2 : Institut Pertanian Bogor (2004 – 2007)

Question : Bagaimana pandangan Bapak tentang pembangunan berkelanjutan di Papua?

Answer : Menurut saya pembangunan berkelanjutan di Papua khususnya berkaitan dengan konservasi dapat kita lihat dari biotik dan abiotiknya. Maksudnya adalah interaksi antara biotik dan abiotik mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan berkelanjutan, sehingga jika interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik maka implikasinya adalah akan terciptanya pembangunan berkelanjutan di tanah Papua yang baik juga. Saya melihat dari interaksi biotik dan abiotik terhadap pembangunan berkelanjutan di tanah Papua, manusia memiliki peranan penting untuk mengatur lingkungan yang berbasis pada kearifan lokal. Tetapi proses pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan terkadang tidak memperhatikan nilai-nilai budaya secara menyeluruh yang menimbulkan banyak hambatan. Untuk mewujudkannya diperlukan komunikasi yang baik antara masyarakat lokal, pemuka agama, pemerintah dan civitas akademika.

Question : Menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan di Papua?

Answer : Tantangan terbesar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tanah Papua adalah komunikasi yang kurang baik. Terkadang pihak yang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan diketahui masyarakat lokal setelah kegiatan tersebut terlaksana, sehingga dalam pelaksanaannya ternyata dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai budaya setempat. Selain itu, terjadi gesekan antara pembangunan ekonomi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sifat ke-manjaan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi menyebabkan masyarakat bergantung pada pemerintah. Disaat hal-hal tersebut tidak diberikan pemerintah kemudian kedesakan ekonomi menuntut, maka masyarakat akan melakukan sesuatu yang berdampak pada keseimbangan ekosistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contohnya: masyarakat menjual tanah yang berada dipinggiran DAS untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan alasan itu merupakan tanah hak ulayat.

Question : Bagaimana peran UNIPA sebagai salah satu unit lembaga akademika untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Papua?

Answer : Peran dari UNIPA untuk menunjang pembangunan berkelanjutan pastinya sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. UNIPA harus banyak berperan dalam kajian-kajian ilmiah yang mendukung pemerintah untuk melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan kearifan lokal.

Pesan : *"Pembangunan berkelanjutan di tanah Papua dapat terlaksana jika terciptanya kerjasama yang baik antara masyarakat lokal dengan stakeholder terkait. Saya ibaratkan seperti satu tungku tiga batu, masyarakat dan stakeholder itu adalah tiga batu sedangkan tungku merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Jika satu batu miring maka posisi dari tungku itu akan miring dan isinya bisa tumpah".*

SEBERAPA PENTING DATA

Dariani Matualage

Sub Divisi Koleksi dan Manajemen Data

TNTC Tahun 2014, sebagian besar masyarakat di kampung ini bekerja sebagai:

Nama Kampung

Bawei (40%)
Goni (61,5%)
Noridwar (57,1%)
Syeiwar (60%)
Waprak/Saref (84,6%)
Wetitindau (60%)
Yariyari (70%)
Yomakan (69,2%)
Yomber (33,3%)
Nanimori (40%)
Iseren (50%)
Senebuay (70%)
Yembikiri I (41,2%)



Melaut

Nama Kampung

Bawei (40%)
Yomber (33,3%)
Dunser (38,5%)
Sasirei (53,3%)
Iseren (50%)

Bertani



Mengambil Hasil Hutan

Nama Kampung

Bawei (40%)
Napan Yaur (55,6%)
Yeretuar (43,8%)
Ambuni (42,9%)
Rasiei (40%)



Nama Kampung

Yembekiri II (50%)
Torey (40%)



Pekerjaan lain

KONTAK KAMI



Newsletter ini diterbitkan oleh:

Divisi Center of Excellence untuk Pembangunan Berkelanjutan

d/a Gedung Rektorat Lama Block 3, No. 1-3
Jln. Gunung Salju Amban Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
No HP : +6282248097263
email: coe.lp2m@unipa.ac.id
facebook: CoE UNIPA
web-site: lp2m.unipa.ac.id/coe/

